

**Terbatasnya Syarat Permohonan Kasasi terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 = Limited Requirements for Cassation Application Against Decision on Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Based on Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021**

Markhamah Isnaini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920566024&lokasi=lokal>

---

**Abstrak**

Tujuan dari PKPU adalah tercapainya perdamaian antara debitor dengan kreditor melalui rencana perdamaian yang diusulkan oleh debitor. Perdamaian dinyatakan tercapai ketika rencana perdamaian yang diusulkan oleh debitor disetujui oleh mayoritas kreditor dan disahkan oleh pengadilan niaga melalui homologasi. Namun terhadap rencana perdamaian yang ditolak oleh mayoritas kreditor, maka debitor dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan niaga. Terhadap putusan pernyataan pailit tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Berdasarkan hal tersebut terdapat Judicial Review dengan nomor perkara 23/PUU-XIX/2021, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi saat ini, terhadap putusan PKPU diberlakukan upaya hukum kasasi dengan syarat yang terbatas. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk menganalisis syarat-syarat terbatas dalam permohonan kasasi terhadap putusan PKPU dan menganalisis konsep PKPU yang ideal yang dapat diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian syarat yang terbatas dalam permohonan kasasi terhadap putusan PKPU adalah kurang tepat karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Hal ini berbeda dengan Singapura yang tidak memberikan persyaratan terbatas dalam permohonan upaya hukum terhadap putusan Scheme of Arrangement dan Judicial Management. ....The purpose of PKPU is to achieve peace between debtors and creditors through a peace plan submitted by the debtor. Peace is declared achieved if the peace plan submitted by the debtor is approved by the majority of creditors and ratified by the commercial court through homologation. However, for peace plans that are rejected by the majority of creditors, the debtor is declared bankrupt through a commercial court decision. No legal action can be taken against the bankruptcy statement decision. Based on this, a Judicial Review was carried out with case number 23/PUU-XIX/2021. In the Constitutional Court Decision, currently a cassation can be filed against a PKPU decision with limited requirements. Therefore, this thesis aims to analyze the limited requirements in the cassation application against the Decision of PKPU and to analyze the ideal concept of the PKPU that can be applied in Indonesia. The results of this study indicate that providing limited requirements in the cassation application against the Decision of PKPU is inappropriate because it can cause injustice. This is different from Singapore which does not impose any limited requirements in filing legal action against the Decisions of Judicial Management and Scheme of Arrangement.